



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR NUGRAHA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 762820

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **419.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , LAINNYA Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1136 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 63.000.000
3. Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 56.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **98.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI FK 110 SD K6 (NEW SMASH SPOKE) Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA NEW AVANZA 1.3 E M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **33.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **177.536.109**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **727.536.109**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **727.536.109**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.